

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan keberagaman yang sangat luas, melihat dari sisi etnis, ras, agama, budaya, dan bahasa. Keberagaman ini digambarkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan bahwa perbedaan adalah komponen penting dari identitas bangsa. Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku, menjadikannya salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Situasi ini menyebabkan interaksi sosial di masyarakat Indonesia selalu melibatkan kelompok yang berbeda, yang dapat menimbulkan harmoni atau konflik, tergantung pada cara keberagaman itu dikelola (Prasetya, Tondok, 2020).

Keberagaman tersebut berperan esensial dalam mengatur dinamika sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia setiap hari. Hubungan antar individu maupun kelompok dengan latar belakang yang berbeda mendorong terciptanya pola kehidupan yang saling melengkapi, baik di ranah sosial, budaya, dll. Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia menunjukkan beragam cara beradaptasi dan berintegrasi yang memungkinkan suatu perbedaan dapat berjalan dengan aman dalam kehidupan kerbersamaan. Di sisi lain, keberagaman juga dapat memperkaya identitas nasional melalui pertukaran nilai-nilai, adat dan praktik budaya yang terus mengalami kemajuan seiring berjalannya waktu. Maka dari itu, keberagaman tidak hanya dilihat sebagai keadaan yang bersifat objektif, namun diartikan juga sebagai proses sosial yang dinamis dalam realita kehidupan masyarakat.

Salah satu suku yang menjadi bagian dari keragaman di Indonesia adalah suku Tionghoa. Kehadiran suku Tionghoa di Indonesia sudah ada sejak lama dan menjadi elemen penting dalam dinamika sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Dalam perjalanan waktunya, suku Tionghoa tidak hanya muncul sebagai kelompok imigran, tetapi juga berperan dalam membangun wajah masyarakat yang beragam budaya. Hubungan antara suku Tionghoa dan masyarakat lokal di berbagai wilayah menunjukkan adanya proses penyesuaian dan penyatuan yang bervariasi, sehingga membentuk gaya hidup yang unik dalam konteks keragaman di Indonesia.

Dinamika eksistensi posisi identitas etnis Tionghoa sangat terkait dengan cara mereka diperlakukan oleh pihak berkuasa. Selama masa penjajahan Belanda, perbedaan status etnis diberlakukan dengan ketat. Orang Eropa memperoleh status tertinggi dan menikmati hak serta fasilitas terbaik. Sementara itu, orang Cina yang dikenal saat itu sebagai orang Timur Asing berada pada posisi di bawah orang Eropa, dan penduduk asli menduduki status terendah (kecuali bangsawan yang memiliki status serupa dengan orang Eropa). Ini adalah kebijakan yang sengaja diterapkan oleh kaum Belanda untuk menjaga pemisahan antara masyarakat Tionghoa dan penduduk asli, yang sering disebut kebijakan "Membagi dan Memerintah". Hal ini muncul dari ketakutan bangsa Belanda jika masyarakat Tionghoa bersatu dengan penduduk asli, dapat menciptakan power untuk menentang penjajahan Belanda di Indonesia. Penjajah Belanda berusaha untuk memperburuk pandangan kelompok pribumi terhadap etnis Tionghoa. Salah satu contohnya adalah pemberian keistimewaan kepada keturunan Tionghoa, seperti akses ke pendidikan yang lebih baik dan peluang kerja (Kusyadi dkk, 2023).

Memasuki periode pemerintahan Soeharto, posisi masyarakat Tionghoa mengalami perubahan besar dalam konteks politik negara. Berbeda dengan saat kolonial di mana mereka berperan sebagai perantara ekonomi, pada era Orde Baru, pemerintah secara aktif campur tangan dalam identitas etnis Tionghoa melalui berbagai kebijakan asimilasi. Pemerintah menerbitkan peraturan yang membatasi ekspresi budaya Tionghoa di depan publik, termasuk pelarangan adanya bahasa Mandarin, pembatasan perayaan tradisi budaya, serta penggantian nama menjadi nama-nama yang lebih Indonesia. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat integrasi nasional, namun dalam praktiknya justru mengarah pada penghapusan identitas kultural etnis Tionghoa secara tersruktur (Aryani, 2022).

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 merupakan bentuk kebijakan dimana secara langsung membatasi kegiatan keagamaan dan tradisi Tionghoa di muka publik. Dalam hal ini, negara tidak hanya bertindak sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pihak yang menentukan batasan-batasan pengakuan suatu identitas. Etnis Tionghoa didorong untuk beradaptasi dengan identitas nasional yang lebih terlihat dominan, sehingga menciptakan situasi di mana ekspresi identitas perlu dinegosiasikan dengan sangat hati-hati. Ini mengindikasikan bahwa identitas etnis pada masa Orde Baru tidak bersifat otonom, melainkan berada di bawah kontrol politik yang ketat dari pemerintah (Fitrya, 2013).

Di Indonesia Etnis Tionghoa termasuk dalam kelompok 20 terbesar penduduk di negara ini. Mengacu pada data Sensus Penduduk 2010, jumlah orang keturunan Tionghoa di Indonesia mencapai 2,83 juta orang, yang setara dengan sekitar 1,2 persen dari keseluruhan populasi Indonesia yang berjumlah 236,73 juta orang.

Dengan angka tersebut, warga keturunan etnis Tionghoa menempati posisi ke-18 berdasarkan kelompok suku yang ada di Indonesia. Meskipun termasuk dalam kelompok minoritas, keberadaan etnis Tionghoa memiliki dampak yang penting dalam perubahan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di Kota Tasikmalaya. Namun, informasi mengenai populasi etnis Tionghoa di Kota Tasikmalaya secara pastinya tidak penulis dapatkan secara aktual dan akurat dalam statistik resmi yang disebabkan oleh keterbatasan dalam pencatatan etnis saat sensus penduduk serta sifat identitas etnis yang sangat sensitif.

Kota Tasikmalaya adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang dikenal dengan masyarakatnya yang religius serta budaya Sunda yang kental. Secara resmi, Kota Tasikmalaya dibentuk pada tahun 2001 melalui pemekaran dari Kabupaten Tasikmalaya, meskipun secara historis, kawasan ini telah berkembang sejak zaman kolonial Belanda sebagai pusat kegiatan ekonomi ataupun sosial. Pada perkembangannya, jumlah etnis Tionghoa di Kota Tasikmalaya meningkat dengan cepat, terutama di daerah perkotaan seperti Kecamatan Cihideung, Cipedes, dan Tawang yang berfungsi sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan. Kepadatan penduduk yang tinggi di kawasan-kawasan ini juga berdampak pada dinamika sosial, termasuk dalam hubungan identitas antara berbagai kelompok etnis (Zamzam, dkk, 2024).

Dalam konteks pluralisme, keberadaan kelompok minoritas, seperti etnis Tionghoa, merupakan bagian dari tatanan sosial yang hidup berdampingan dengan masyarakat yang lebih besar. Insiden kerusuhan di Tasikmalaya pada 26 Desember 1996 adalah salah satu contoh konflik sosial yang memberikan pengaruh besar

terhadap kehidupan masyarakat, terutama etnis Tionghoa. Kerusuhan ini dipicu oleh tindakan penganiayaan terhadap seorang ustadz oleh anggota kepolisian, yang menyulut solidaritas dari masyarakat, terutama kalangan santri dan umat Islam di Tasikmalaya. Tindakan solidaritas yang semula berupa kegiatan keagamaan kemudian berubah menjadi unjuk rasa yang berujung pada tindakan kekerasan, termasuk perusakan terhadap fasilitas umum, tempat ibadah, dan properti milik etnis Tionghoa (Tantoh., & Sampurno; 2020).

Gambar 1.1 Kerusuhan Tasikmalaya 26 Desember Tahun 1996



Sumber: Kompasnia

Dalam perjalanan waktu, tujuan dari kerusuhan mengalami perubahan yang signifikan. Pada awalnya, kemarahan masyarakat ditujukan kepada pihak berwenang, terutama kepolisian. Namun, seiring berjalannya waktu, kekerasan semakin meluas dan dialihkan ke arah komunitas etnis Tionghoa. Perubahan ini mengindikasikan bahwa kerusuhan tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan merupakan gabungan dari berbagai masalah sosial yang sudah lama terpendam. Beberapa studi menunjukkan adanya ketidakadilan ekonomi, di mana

sektor perdagangan banyak dikuasai oleh etnis Tionghoa, yang berujung pada kecemburuan sosial di kalangan masyarakat setempat (Muhammad, 2023).

Jika diteliti lebih mendalam, kerusuhan Tasikmalaya pada tahun 1996 tidak dapat dipisahkan dari konteks politik di era Orde Baru. Kejadian ini menggambarkan adanya hubungan politik yang rumit antara negara, rakyat, dan kaum minoritas. Di satu sisi, terdapat konflik vertikal antara masyarakat dan aparat pemerintah akibat kondisi ketidakpuasan terhadap pemerintah penegakan hukum. Di sisi lainnya, konflik itu berkembang menjadi bentrokan bersifat horizontal antara masyarakat lokal dengan etnis Tionghoa. Hal ini menunjukkan bahwa ketegangan politik tidak selalu diarahkan langsung kepada negara, tetapi dapat pula disalurkan kepada kelompok yang dianggap berbeda atau lemah secara sosial.

Lebih jauh lagi, kekacauan ini juga menunjukkan bahwa identitas etnis dapat menjadi target di tengah krisis sosial-politik. Dalam kasus ini, kelompok etnis Tionghoa tidak terlibat secara langsung dalam konflik yang terjadi, tetapi dapat menjadi korban dari dinamika politik yang lebih besar. Ini menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu, identitas etnis dapat dipolitisasi dan terkait dengan berbagai masalah seperti ekonomi, agama, atau kekuasaan. Insiden kerusuhan di Tasikmalaya pada tahun 1996 tidak hanya bisa dilihat sebagai konflik sosial belaka, tetapi juga sebagai gambaran dari hubungan politik yang tidak seimbang di tengah sosial masyarakat.

Dalam konteks kehidupan sosial Indonesia khususnya di Tasikmalaya, masyarakat Tionghoa seringkali dipandang sebagai kelompok yang lebih memilih untuk bersikap tertutup atau eksklusif. Pandangan ini muncul karena mereka

memiliki pola interaksi yang cukup terbatas dengan komunitas di luar kelompok mereka, seperti kebiasaan tinggal di area tertentu, jarang terlibat dalam aktivitas sosial di lingkungan sekitarnya, serta rumah yang cenderung tertutup. Beberapa studi menunjukkan bahwa kondisi ini dapat diartikan sebagai bentuk pengelompokan sosial yang memperkuat rasa identitas di dalam kelompok, tetapi di sisi lain juga dapat menciptakan jarak sosial dengan lingkungan di sekitar (Fittrya, 2013).

Selain itu, pola tersebut tidak dapat dipisahkan dari latar belakang sejarah yang mempengaruhi interaksi sosial komunitas Tionghoa di Indonesia. Kebijakan pemisahan pada zaman kolonial dan batasan identitas selama periode Orde Baru juga berkontribusi terhadap kehidupan yang lebih tertutup sebagai respons terhadap kondisi sosial dan politik. Dalam hal ini, cara pandang yang dilihat sebagai eksklusif sebenarnya bisa dianggap sebagai upaya untuk menjaga keamanan, identitas, dan solidaritas kelompok di tengah situasi yang tidak selalu memberikan kesempatan yang adil. Jadi, eksklusivitas tidak sepenuhnya bisa dianggap sebagai sifat yang melekat, melainkan sebagai hasil dari proses sejarah dan sosial cukup panjang yang dialami oleh mereka.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang persepsi eksklusivitas terhadap komunitas Tionghoa, teori politik pengakuan dari Charles Taylor menjadi kunci untuk menganalisis permasalahan ini. Taylor menguraikan bahwa pengakuan merupakan kebutuhan fundamental manusia dalam berinteraksi secara sosial, karena identitas baik individu maupun kelompok dibangun melalui hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, kekurangan dalam memberikan

pengakuan yang sesuai, yang dikenal sebagai *misrecognition*, dapat menyebabkan pembentukan identitas yang menyimpang serta menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat (Taylor, 1994).

Dalam kasus etnis Tionghoa, sebutan sebagai kelompok yang “tertutup” atau “eksklusif” bisa dilihat sebagai bentuk kesalahan pemahaman, yaitu salah dalam mengidentifikasi dan mengenali ciri suatu kelompok. Pandangan ini tidak selalu mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, melainkan dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang muncul dari sejarah panjang interaksi antar kelompok, termasuk pengalaman diskriminasi, pemisahan, serta konflik sosial seperti kerusuhan Tasikmalaya pada tahun 1996. Sebagai akibatnya, identitas etnis Tionghoa sering kali disederhanakan menjadi stereotip tertentu yang tidak sepenuhnya mencerminkan kebenaran.

Lebih jauh lagi, dari sudut pandang politik, *misrecognition* tidak hanya memengaruhi dimensi sosial, tetapi juga berhubungan dengan posisi suatu kelompok dalam tatanan masyarakat. Jika sebuah kelompok terus menerus dilihat secara negatif atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, kondisi ini dapat mempengaruhi perlakuan terhadap kelompok tersebut dalam arena publik. Dalam hal ini, kecenderungan etnis Tionghoa untuk mengurangi interaksi sosial dapat dipandang sebagai reaksi terhadap pengalaman kesalahan pengenalan yang mereka hadapi. Fenomena eksklusivitas tidak dapat dipahami hanya sebagai sifat kelompok, tetapi harus dilihat sebagai konsekuensi dari dinamika pengakuan yang tidak adil dalam hubungan sosial dan politik.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial yang diperlihatkan oleh masyarakat Tionghoa, studi ini mengacu juga pada gagasan tindakan sosial yang diajukan oleh Max Weber. Weber menyatakan bahwa setiap aksi individu memiliki arti subjektif yang mendasari tindakan tersebut, sehingga suatu tindakan tidak bisa hanya dipahami dari aspek penampilan luar. Dalam hal ini, perilaku yang dianggap oleh masyarakat sebagai sikap tertutup tidak secara otomatis mencerminkan identitas suatu kelompok, melainkan harus dipahami berdasarkan makna yang mendasarinya (Muhlis., & Nurholis).

Lebih lanjut, Weber menyatakan bahwa perilaku sosial selalu berhubungan dengan orientasi terhadap orang lain, dimana arti dari suatu tindakan terbentuk melalui nilai, pengalaman, dan keadaan yang dihadapi oleh individu maupun kelompok. Dengan demikian, kecenderungan etnis Tionghoa dalam membatasi interaksi sosial dapat dikatakan sebagai bentuk tindakan yang memiliki makna khusus, seperti usaha untuk mempertahankan identitas budaya, atau sebagai respons terhadap pengalaman sejarah yang telah dialami. Oleh karena itu, pendekatan ini membantu kita untuk memahami bahwa perilaku sosial tidak bisa dinilai secara sepihak, melainkan harus dianalisis lebih mendalam berdasarkan sudut pandang para pelakunya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kristina Roseven Nababan pada tahun 2022 dengan judul "Stereotip dan Penolakan Indekos Mahasiswa Asal Papua di Salatiga, Jawa Tengah". Penelitian ini mengupas bagaimana pandangan negatif dan prasangka sosial terhadap mahasiswa Papua berpengaruh pada interaksi sosial dengan masyarakat sekitar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya

stigmatisasi terhadap kaum minoritas dapat menyebabkan timbulnya penolakan sosial, contohnya kesulitan dalam mencari tempat tinggal, serta menciptakan adanya jarak sosial antara kelompok mayoritas dan minoritas. Poin utama dari penelitian ini adalah hubungan yang terjadi antara prasangka, stereotip, dan berbagai bentuk diskriminasi yang dirasakan oleh kelompok minoritas dalam sosial masyarakat.

Meskipun kedua penelitian berfokus pada kelompok minoritas serta pandangan sosial dari masyarakat, terdapat perbedaan dengan studi yang penulis lakukan. Penelitian ini belum membahas mengenai keberadaan etnis, khususnya Etnis Tionghoa. Terutama mengenai perbedaan antara pandangan masyarakat tentang etnis Tionghoa yang dianggap tertutup dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh etnis Tionghoa itu sendiri. Selain itu, penelitian ini juga tidak mengeksplorasi arti di balik perilaku kelompok minoritas ataupun aspek pengakuan dari sudut pandang politik.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Murdianto pada tahun 2018 berjudul "Stereotipe, Prasangka dan Resistensinya (Studi Kasus pada Etnis Madura dan Tionghoa di Indonesia)", menyoroti bagaimana stereotip serta prasangka terbentuk dan dampaknya dalam interaksi sosial. Namun, studi ini tidak mengulik makna yang mendasari tindakan sosial yang dilakukan oleh komunitas Tionghoa, dan juga belum meninjau fenomena ini dari sudut pandang pengakuan politik. Di satu sisi, penelitian yang penulis lakukan lebih mengedepankan pandangan yang berbeda yaitu masyarakat yang menganggap etnis Tionghoa sebagai kelompok eksklusif dengan pengalaman yang dirasakan oleh komunitas Tionghoa itu sendiri.

Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan pendekatan tindakan sosial dari Max Weber untuk menggali makna di balik perilaku tersebut, serta teori pengakuan politik dari Charles Taylor untuk menganalisis kemungkinan adanya kesalahan pengakuan dalam hubungan sosial yang berlangsung.

Selanjutnya, terdapat penelitian sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Rani Febrina Ketaren dan Omar Khalifa Burhan dengan judul "Hubungan Persepsi Keselarasan Budaya dengan Strategi Akulturasi Etnis Lokal terhadap Etnis Tionghoa di Medan". Penelitian ini mengeksplorasi keterkaitan antara persepsi keselarasan budaya dan strategi akulturasi dari komunitas lokal terhadap etnis Tionghoa di Medan dengan menggunakan metode kuantitatif. Fokus utama penelitian ini adalah pada interaksi antar variabel sosial, seperti persepsi dan strategi akulturasi, dengan tujuan untuk menganalisis pola keterhubungan dan kecenderungan perilaku masyarakat secara umum. Berbeda dengan studi tersebut, penelitian yang penulis lakukan mengadopsi pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai fenomena sosial dari sudut pandang subjek yang diteliti. Penelitian ini tidak hanya menganalisis hubungan antara variabel yang ada, tetapi juga berusaha untuk menggali makna yang terkandung dalam perilaku sosial etnis Tionghoa, yang sering dianggap sebagai kelompok yang tertutup. Dengan demikian, perbedaan dalam pendekatan metodologis ini menciptakan peluang penelitian baru, di mana pendekatan kualitatif diadopsi untuk mengisi kekurangan dari penelitian kuantitatif dalam memahami realitas sosial secara lebih luas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara pandangan masyarakat dan kenyataan yang dihadapi oleh komunitas Tionghoa, serta mengeksplorasi bagaimana konstruksi sosial ini terhubung dengan hubungan kekuasaan dalam proses pengakuan identitas. Dengan memanfaatkan teori politik pengakuan dari Charles Taylor dan analisis tindakan sosial dari Max Weber, penulis merasa perlu untuk menyelidiki secara mendalam bagaimana masyarakat melihat keberadaan Etnis Tionghoa di sekitar mereka, serta bagaimana pandangan tersebut berbalik.

Berdasarkan latar belakang ini, perbedaan pandangan masyarakat terhadap orang Tionghoa dapat diartikan sebagai bagian dari proses politik identitas yang lebih luas daripada hanya fenomena sosial. Persepsi dapat memengaruhi pola relasi sosial, menyebabkan kedekatan, jarak sosial, dan pelabelan tertentu terhadap suatu kelompok.

Maka dari itu, menjadi hal yang penting untuk melakukan penelitian ini dalam mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana persepsi masyarakat dibentuk, bagaimana arti atau makna tersebut dibentuk dalam interaksi sosial, dan bagaimana hal ini berdampak pada praktik politik identitas yang muncul dalam masyarakat yang multikultural khususnya di Kota Tasikmalaya. Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman mengenai dinamika hubungan antar kelompok dan juga memperkaya mengenai pemahaman politik identitas dalam konteks tingkat lokal atau daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dilampirkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

”Bagaimana perspektif politik identitas Etnis Tionghoa tentang eksklusi sosial minoritas di Kota Tasikmalaya?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini yakni:

1. Mendapatkan gambaran terkait perspektif politik identitas Etnis Tionghoa tentang eksklusi sosial minoritas di Kota Tasikmalaya.
2. Mengkaji dan meraih penjelasan mengenai perspektif politik identitas Etnis Tionghoa tentang eksklusi sosial minoritas di Kota Tasikmalaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1.4.1 Manfaat Penelitian Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat teoritis, yaitu menyediakan dasar bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian serupa untuk meningkatkan kemampuan akademis, ilmu pengetahuan, dan berfungsi sebagai referensi untuk karya ilmiah yang lain.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pengembangan teoritis keilmuan yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum dalam konteks politik identitas.
- c. Penelitian diyakinkan dapat memberikan sumbangasih pemikiran berbasis teoritis bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan pemahaman politik identitas sehingga penelitian ini bisa menjadi referensi bagi para peneliti lainnya yang ingin memperdalam permasalahan yang serupa.

1.4.2 Manfaat Penelitian Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan praktis dan memperkaya pemahaman, serta memberikan masukan kepada pemerintah untuk memahami dinamika sosial dalam konteks keberagaman.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan informasi yang berguna, terutama terkait dengan studi isu politik identitas, hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas dalam konteks lokal.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi landasan atau perbandingan bagi studi-studi berikutnya yang mengangkat tema yang sama dengan sudut pandang atau metode yang berbeda.